

RENCANA TINDAK SEKTOR KEHUTANAN PADA KAWASAN USAHA AGRIBISNIS TERPADU DI KALIMANTAN BARAT

ACTION PLAN OF FOREST SECTOR ON INTEGRATED AGRIBUSINESS REGION IN WEST KALIMANTAN

Ikin Sadikin¹⁾ dan Rusli Burhansyah²⁾

1) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat

2) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat

ABSTRACT

Agribusiness Region Integrated Program is one approach to agricultural development program in West Kalimantan. The purpose of this study were (1) identify the resources in the program, social, economic, cultural, and (2) to formulate strategies and policies of the forestry sector to be the Action Plan program. The research was carried out in the program area covers 12 counties or cities in West Kalimantan. The study was conducted from April to December 2006, using primary and secondary data. Data was collected through observation, interviews, and the RRA. The results showed: (1) not all areas have forest areas, necessitating the grouping area, (2) in general from the administrative side, the location of zoning position to elicit a response from the district or city, (3) planning the development of commodities have been good, seen from the availability of adequate raw water, especially for food crops and fisheries, (4) most of the area is safe from the danger of drought.

Key-words: agribusiness, region, commodity

INTISARI

Program Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu merupakan salah satu pendekatan program pembangunan pertanian di Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi sumber daya di daerah program, kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat, dan (2) merumuskan strategi dan kebijakan sektor kehutanan untuk menjadi Rencana Tindak program ini. Penelitian ini dilaksanakan di area program meliputi 12 kabupaten atau kota di Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan bulan April hingga Desember 2006, menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan RRA. Hasil penelitian menunjukkan: (1) tidak semua wilayah memiliki kawasan hutan, sehingga diperlukan pengelompokan wilayah; (2) secara umum dari sisi administratif, penetapan wilayah lokasi memperoleh respon positif dari pemerintah kabupaten atau kota; (3) perencanaan pengembangan komoditas unggulan sudah baik, dilihat dari ketersediaan air baku yang memadai terutama untuk tanaman pangan dan perikanan, (4) sebagian besar kawasan aman dari bahaya kekeringan.

Kata kunci: agribisnis, kawasan, komoditi

¹⁾ Alamat penulis untuk korespondensi: (1) Ikin Sadikin, BPTP Jawa Barat, Jl. Kavuyambon No.80, Lembang, Bandung Barat 40391. Tel. (022) 2786238 Fax. (022) 2789846. e-mail: bptn-
jabar@lithang.deptan.go.id. (2) Rusli Burhansyah, BPTP Kalbar, Jln. Budi Utomo No. 45 Siantan
Hulu, Pontianak 78061. Tel. 0561 - 882069; 8835883. Fax: 0561 - 883883; 884125.

PENDAHULUAN

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan cukup luas, yaitu sekitar 6,39 persen dari luas kawasan hutan di Indonesia. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.259/KPTS-II/2001, sampai tahun 2005, luas kawasan hutan di Kalimantan Barat mencapai sekitar 9.178.760 ha yang terdiri dari 5.226.135 ha kawasan budidaya (*cultivated area*) dan 3.952.625 ha kawasan lindung (*protected forest*). Dalam kawasan lindung, hutan lindung memiliki luas terbesar setelah hutan taman nasional, yaitu masing-masing seluas 2.307.045 ha dan 1.252.895 ha. Adapun pada kawasan budidaya, sebagian besar merupakan hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa, dan hutan produksi konversi, yaitu masing-masing seluas 2.445.985 ha, 2.265.800 ha, dan 514.350 ha (Anonim 2006).

Program KUAT merupakan salah satu visi dari pemerintah Kalimantan Barat (Kalbar) untuk mewujudkan 'Maju dalam Usaha' melalui strategi *Kalbar Incorporated*. Program pengembangan KUAT merupakan program sinergitas lintas sektor dan lintas komoditi pada kawasan yang mampu menjadi penggerak (*prime-mover*) bagi kawasan sekitarnya. Pendekatan KUAT adalah pendekatan kawasan dengan '*total concept*', yaitu membangun sebuah mata rantai agribisnis mulai dari sektor hulu sampai hilir.

Salah satu strategi kehutanan ke depan adalah ikut meningkatkan kesejahteraan atau pendapatan masyarakat yang berada di sekitar hutan melalui kegiatan yang berkaitan dengan bidang kehutanan atau non kehutanan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan pembangunan Kalimantan Barat, khususnya Pengembangan Kawasan Usaha Agribisnis

Terpadu (KUAT), yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain, masyarakat sekitar hutan merupakan kelompok masyarakat yang termarjinalkan oleh pelaku ekonomi, yakni perusahaan swasta dan BUMN. Semenjak operasionalisasi para pelaku ekonomi tersebut maka akses masyarakat adat terhadap hutan semakin sempit, bahkan di beberapa tempat menjadi terputus sama sekali (Purwana & Sukasmanto 2008). Eksploitasi sumber daya alam di Kalbar berlangsung secara sistematis dan dalam skala besar dengan melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan dipersiapkan untuk dapat melegitimasi pengurusan sumber daya alam tersebut (Kartika dan Gautama, 2008 *dalam* Purwana & Sukasmanto 2008).

Manfaat ekonomi hutan rakyat secara langsung dapat dirasakan masing-masing rumah tangga sebagai pelakunya dan secara tidak langsung berpengaruh pada perekonomian desa. Ekonomi pedesaan yang dimaksud di sini lebih diartikan sebagai ekonomi yang berlaku di wilayah pedesaan (Darusman & Hardjanto 2006).

Program KUAT yang telah dicanangkan Gubernur Kalimantan Barat melalui SK No.436 Tahun 2004 merupakan salah satu pendekatan program pembangunan pertanian di Kalimantan Barat. Dalam pelaksanaan di lapangan, program KUAT melibatkan sektor pertanian dalam arti luas, termasuk sektor kehutanan. Untuk menyinergikan program kehutanan ke dalam program KUAT, maka diperlukan suatu Rencana Tindak sektor Kehutanan.

Dengan begitu, maka pengembangan KUAT diharapkan akan mampu mentransformasikan proses pengolahan hasil dari tahap "petik dan jual"

menuju ke tahap “petik, olah, kemas, dan jual”. Di samping itu diharapkan mampu mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan baru dan mata pencaharian yang beragam (*multi job*) bagi petani, sehingga mereka mampu meningkatkan pendapatan perkapita mereka. Program KUAT dibangun melalui inovasi yang berbasis IPTEK serta membangun SDM dengan spirit kompetisi yang sehat. Karenanya, KUAT diharapkan mampu menjadi sebuah sistem agribisnis dengan tiga pilar utama, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi sumber daya pada KUAT dan daerah penyangga serta mengidentifikasi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, dan (2) merumuskan strategi dan kebijakan sektor kehutanan untuk menjadi Rencana Tindak pada Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu.

METODE

Penelitian ini dilakukan berdasarkan alasan riset termasuk riset terpakai (*applied research*), menurut tempat penelitian termasuk riset lapangan (*field research*), sedangkan berdasarkan teknik riset ini menggunakan teknik survei (*survey technique*). Riset terpakai adalah suatu riset yang mempunyai tujuan atau alasan praktis (*practical reason*) untuk mengetahui sesuatu dengan tujuan agar bisa melakukan sesuatu lebih baik, efektif, dan efisien. Riset lapangan adalah riset yang dilakukan dengan jalan mendatangi tempat sampel, seperti rumah tangga, perusahaan, dan lokasi tempat penelitian dilakukan. Penelitian dengan teknik survei adalah penelitian yang bersifat diskriptif untuk menguraikan suatu keadaan tanpa melakukan perubahan terhadap variabel tertentu (Supranto 1997).

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu yang berada di 12 kabupaten atau kota di Kalimantan Barat, pada bulan April sampai Desember 2006. Pengambilan sampel dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai populasi, dengan cara mengamati sebagian dari populasi tersebut.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu petani responden. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai instansi tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang terkait, berupa Surat Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peta lokasi, Rencana Kegiatan KUAT, Program Kehutanan Kabupaten, dan lain-lain. Di samping itu juga dikumpulkan data biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: teknik observasi, teknik wawancara, dan *Rural Rapid Appraisal* (pemahaman pedesaan secara singkat). Teknik observasi adalah cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan langsung secara cermat dan sistematis, baik secara partisipatif maupun non partisipatif. Teknik wawancara adalah cara pengumpulan data dengan bertanya langsung atau berdialog dengan responden. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan (*questionnaire*) terstruktur, hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang terarah dan sesuai dengan yang dikehendaki (Suratno & Arsyad 1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi KUAT.

Pencanangan model pengembangan pertanian melalui pendekatan Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan sejak

tahun 2004. Pencanaan ini dimulai pada KUAT KAKAP BANGKIP di Kabupaten Pontianak. Selanjutnya kawasan KUAT menyebar pada masing-masing Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Secara rinci lokasi KUAT dapat dilihat pada Tabel 1.

Komitmen Pemerintah Kabupaten atau Kota. Penelusuran terhadap kelengkapan administrasi penetapan lokasi KUAT, menunjukkan adanya respons positif dari Pemerintah Kabupaten atau Kota atas penetapan lokasi KUAT. Hampir seluruhnya telah menindaklanjuti SK Gubernur No.436/2004 tentang Tim Pengembangan Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu, dengan menerbitkan SK baru tentang Penetapan lokasi dan anggota Tim Teknis di tingkat Kabupaten atau Kota. Di

beberapa lokasi, seperti di lokasi KUAT Kakap Bangkit, KUAT Rasau Jaya, KUAT Singkawang, KUAT Merowi, KUAT Semabi, KUAT Sanggau Ledo, KUAT Senakin, dan KUAT Solam Raya, bahkan telah diangkat seorang manajer dari kalangan profesional yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola kawasan tersebut.

Dalam hal pendekatan pengembangan KUAT yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, seperti dinas atau instansi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, membutuhkan tingkat koordinasi yang intensif agar program dan kegiatan dilaksanakan secara sinerjis. Untuk beberapa lokasi KUAT, seperti lokasi KUAT Kakap Bangkit, KUAT Rasau Jaya, dan KUAT Semabi, telah tersedia rencana

Tabel 1. Lokasi KUAT provinsi Kalimantan Barat

Nama dan Kabupaten	Kecamatan, Luas Wilayah	Komoditas Utama
KUAT Kakap Bangkit Komplek, Kab. Pontianak	Kec. Kakap, 55,257 ha	Padi, Kelapa
KUAT Rasau Jaya Komplek, Kab. Pontianak	Kec. Rasau Jaya, Kubu, Sungai Raya 35.481 ha	Jagung
KUAT Sanggau -Ledo Komplek, Kab.Bengkayang	Kec.Tujuh Belas, Kec.Sanggau Ledo, 5.000 ha	Jagung
KUAT Singkawang Komplek, Singkawang	Kec. Singkawang Selatan, 9.450 ha	Jagung
KUAT Merowi Komplek, Kab.Sanggau	Kec.Kembayam 1.660 ha	Padi
KUAT Solam Raya Komplek, Kab.Sintang	Kec. Tebelian (2.675 ha	Kelapa Sawit, Ikan
KUAT Semabi Komplek, Kab.Sekadau	Kec. Sekadau Hilir	Padi, Karet
KUAT Rantau Panjang Komplek, Kab. Ketapang	Kec. Simpang Hilir	Perikanan
KUAT Bunut Hulu Komplek, Kab. Kapuas Hulu	Kec. Bunut Hulu	Perikanan darat, Karet
KUAT Senakin Kompleks. Kab.Landak	Kec.Sengah Temila	Padi, Karet
KUAT Kotabaru Kompleks, Kab.Melawi	Kec. Tanah Pinoh.	Karet, Kelapa Sawit
KUAT Galing Kompleks, Kab. Sambas	Kec.Galing	Padi, Karet

induk pengembangan KUAT. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada satu lokasipun yang melibatkan sektor kehutanan dalam penyusunan rencana induk pengembangan tersebut. Oleh karena itu, hal yang perlu segera ditangani dalam waktu dekat ini adalah penyusunan master plan yang melibatkan berbagai sektor atau dinas terkait, sehingga master plan tersebut merupakan suatu rencana induk pengembangan kawasan yang menyeluruh dan terpadu.

Potensi Biofisik Kawasan dan Sumber Daya Hutan. Selain pasar, kondisi biofisik, dan sumber daya alam suatu kawasan merupakan faktor penentu yang dominan dalam upaya mengembangkan usaha agribisnis di daerah kawasan. Hal ini berkaitan erat dengan jenis dan varietas komoditas yang akan dikembangkan di kawasan tersebut. Upaya pengembangan kawasan dengan konsep KUAT telah diarahkan melalui pengembangan usaha agribisnis yang melibatkan berbagai pihak.

Berdasarkan kondisi dan potensi biofisik kawasan, telah diusulkan komoditas unggulan yang direkomendasikan untuk dikembangkan di setiap lokasi KUAT. Pengembangan komoditas unggulan tersebut sangat tergantung pada ketersediaan air baku yang memadai, terutama untuk budidaya tanaman pangan dan perikanan. Hal ini akan berkaitan erat dengan kondisi hutan yang ada di sekitar kawasan. Kondisi sumber daya hutan yang baik, seyogyanya berfungsi untuk menjamin ketersediaan air baku, baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Kenyataannya, saat ini kondisi hutan pada umumnya telah terdegradasi secara serius, sehingga tidak lagi dapat diandalkan sebagai penjamin ketersediaan air baku, baik untuk

lahan pertanian maupun untuk keperluan lainnya.

Pengamatan terhadap pola curah hujan bulanan selama 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa lokasi KUAT di Kalimantan Barat dapat dikelompokkan ke dalam lima kelompok sebagai berikut (Ibrahim *et al* 2006).

- A. Lokasi dengan curah hujan di atas 4000 mm per tahun: KUAT Bunut Hulu Komplek
- B. Lokasi dengan curah hujan 3300 hingga 3500 mm per tahun: KUAT Sanggau Ledo dan KUAT Rantau Panjang
- C. Lokasi dengan curah hujan 2900 hingga 3300 mm per tahun: KUAT Kakap Bangkit, KUAT Rasau Jaya, KUAT Merowi, KUAT Semabi, dan KUAT Senakin
- D. Lokasi dengan curah hujan 2400 hingga 2900 mm per tahun: KUAT Singkawang dan KUAT Galing Komplek
- E. Lokasi dengan curah hujan di bawah 2400 mm per tahun: KUAT Solam Raya Komplek.

Pada umumnya, lokasi KUAT dapat digolongkan berdasarkan pola curah hujan bulanan, yaitu lokasi yang memiliki curah hujan sedang sampai sangat tinggi. Keadaan ini mengakibatkan lokasi tersebut aman dari bahaya kekeringan. Hanya satu lokasi KUAT yang memiliki pola curah hujan rendah, sehingga rawan terhadap bahaya kekeringan di musim kemarau, yaitu KUAT Solam Raya Komplek. Pola curah hujan bulanan 10 tahun terakhir di kawasan KUAT ditampilkan pada Gambar 1.

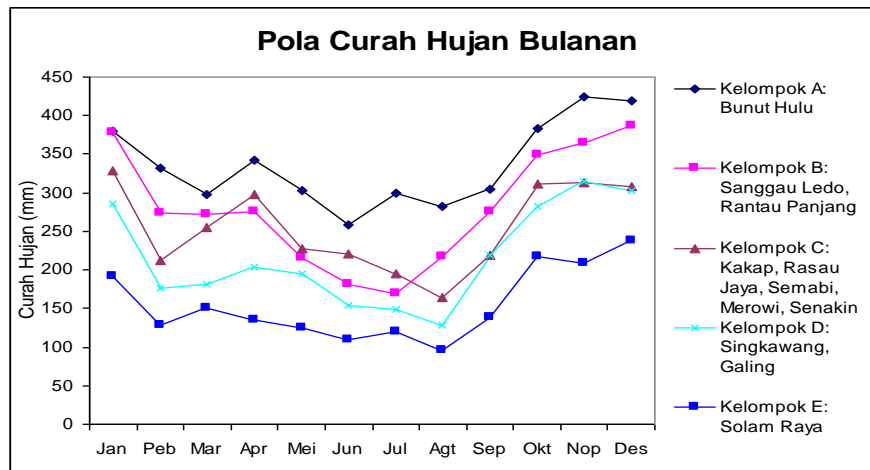
Potensi sumber daya hutan hampir secara merata terdapat di setiap lokasi kawasan KUAT, walaupun dengan kondisi

dan fungsi yang beragam. Hutan bakau dan hutan rawa sekunder terdapat di kawasan pesisir dan dataran rendah yang merupakan kawasan penyangga KUAT Kakap Bangkit, KUAT Rasau Jaya, dan KUAT Rantau Panjang. Selain itu, di dalam dan di sekitar kawasan KUAT lainnya juga terdapat hutan lahan kering sekunder dan primer.

Di beberapa lokasi KUAT juga terdapat kawasan hutan lindung dan cagar alam. Berdasarkan informasi dari masyarakat, di beberapa lokasi telah terjadi alih fungsi lahan dari hutan lindung dan hutan cagar alam menjadi lahan pertanian yang digarap oleh masyarakat setempat. Keadaan ini terjadi di kawasan di sekitar KUAT Singkawang, Sanggau Ledo, Senakin, dan Merowi. Jika keadaan ini tidak segera ditangani serius dan bijak, dikhawatirkan akan mengganggu kondisi dan fungsi hutan lebih luas lagi, sebab kawasan hutan lindung dan cagar alam pada dasarnya berpotensi dikembangkan sebagai sarana wisata (*ecotourism*). Namun pengembangan

kawasan wisata tersebut perlu disertai penguatan kapasitas masyarakat sekitar kawasan hutan.

Potensi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan di dalam KUAT. Masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi KUAT adalah sasaran penerima manfaat sekaligus subjek pengembangan kawasan. Karena itu, masyarakat selayaknya diberi peranan yang cukup besar dalam mengembangkan kawasan, melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan karena kondisi pendidikan umumnya rendah, sebagian besar tidak tamat sekolah dasar. Sebagian besar pendapatan masyarakat kurang dari US \$ 1.000 per kapita per tahun. Lembaga adat atau agama dan tokoh masyarakat umumnya masih sangat berperan dalam menata kehidupan masyarakat sekitar dan di dalam kawasan lokasi KUAT. Peran lembaga tersebut sebaiknya dipertahankan dan diperkuat untuk mendukung pengembangan



Gambar 1. Pola Curah Hujan Bulanan pada Kawasan KUAT dalam 10 tahun terakhir.

Tabel 2. Matriks Kondisi Sosial Ekonomi di Lokasi KUAT Provinsi Kalbar

KUAT	Uraian						
	DS	KEC	JDK	PET	INC	INF	LPE
Kakap Bangkit	12	1	84,965	23,856	2,289,500	baik	baik
Rasau Jaya	20	3	56.348	33,809	5,000,000	baik	baik
Bengkayang	9	2	20.782	12,469	5,116,667	baik	baik
Singkawang	4	1	30.545	18,327	5,500,000	baik	baik
Merowi	3	1	22.090	13,254	3,600,000	baik	baik
Solam Raya	1	1	2.085	1251	9,357,500	baik	baik
Semabi	5	1	15.833	9,500	2,688,500	buruk	kurang
Rantau Panjang	1	1	-	-	-	buruk	kurang
Bunut Hulu	1	1	-	-	-	buruk	kurang
Senakin	6	11	25.186	15,112	-	buruk	baik
Kota Baru	1	1	-	-	-	buruk	kurang
Kuat Galing	1	1	-	-	-	buruk	kurang

Keterangan:

DS = Jumlah desa, KEC = Jumlah kecamatan, DUK = Jumlah penduduk,
 PET = Jumlah petani INC = Pendapatan per kapita, INF = Kondisi infrastruktur,
 LPE = Kondisi lembaga penunjang.

kawasan. Selain itu, hampir di setiap lokasi KUAT telah terbentuk Kelompok Tani atau Nelayan, Koperasi, LSM, dan lembaga keuangan, Bank maupun bukan Bank, yang potensial dalam menunjang program KUAT. Kondisi awal potensi sumber daya manusia, kelembagaan pada lokasi KUAT ditampilkan pada Tabel 2.

Rekomendasi Rencana Tindak KUAT Sektor Kehutanan Kalimantan Barat.

Hasil analisis aspek penting yang mendukung Pengembangan KUAT Sektor Kehutanan, yakni dukungan Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Surat Keputusan, Master Plan), Potensi Kawasan dan Sumber Daya Hutan, Potensi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Masyarakat, serta Isu Pembangunan Kawasan Perbatasan menjadi dasar rekomendasi Rencana Tindak sebagai berikut.

Lokasi Pengembangan Sektor Kehutanan

KUAT Kalimantan Barat. KUAT Tahap-1 (tahun 2007-2010), terdiri dari 7 Lokasi, yaitu: (a) Sanggau Ledo Komplek, Kabupaten Bengkayang; (b) Singkawang Komplek, kota Singkawang; (c) Merowi Komplek, Kabupaten Sanggau; (d) Semabi Komplek, Kabupaten Sekadau; (e) Senakin Komplek, Kabupaten Landak; (f) Galing Komplek, Kabupaten Sambas; (g) Bunut Hulu Komplek, Kabupaten Kapuas Hulu.

KUAT Tahap-2, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan berbagai pihak, terutama inisiatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 5 Lokasi, yaitu: (a) Kakap Bangkit, Kabupaten Pontianak; (b) Rasau Jaya Komplek, Kabupaten Pontianak; (c) Solam Raya Komplek, Kabupaten Sintang; (d) Rantau Panjang Komplek, Kabupaten Ketapang; (e) Kotabaru Komplek, Kabupaten Melawi.

Usulan Program Pokok Sektor Kehutanan KUAT Kalimantan Barat Tahap-1, (tahun 2007 hingga 2010).

Program pokok sektor kehutanan pada Kawasan KUAT didasarkan pada arahan program Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung percepatan pembangunan KUAT. Program-program pokok tersebut, yakni: Perlindungan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hasil Hutan Non Kayu, Rehabilitasi dan Konservasi Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat .

Sektor kehutanan hanyalah salah satu di antara para pihak yang berkontribusi melalui kegiatan dalam rangka percepatan pengembangan KUAT Kalimantan Barat. Koordinasi antarsektor dan program menjadi salah satu prasyarat yang sangat dibutuhkan untuk menyinerjikan berbagai program dan kegiatan lintas sektor dan program. Rekomendasi program dan kegiatan pada tujuh lokasi kawasan KUAT Tahap-1 tahun 2007 hingga 2010 adalah seperti pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rencana Tindak untuk KUAT Tahap-1, Tahun 2007 hingga 2010

Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi KUAT	Pelaksana dan instansi pendukung	Tahun Kegiatan			
				07	08	09	10
A. Prakondisi							
1. Penyusunan Rencana Teknis Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber daya Hutan Tujuannya: Memberikan arahan umum dan acuan teknis perlindungan pemanfaatan sumber daya hutan di lokasi KUAT	4 Paket	Sanggau Ledo, Singkawang, Senakin, Bunut Hulu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leading:</i> Dishut Provinsi ▪ <i>Supporting:</i> Dishut Kab. 				
2. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi dan Konservasi Lahan/ Hutan Tujuannya: Memberikan arahan umum dan acuan teknis rehabilitasi dan konservasi lahan/hutan di lokasi KUAT	4 Paket	Singkawang, Merowi, Semabi, Galing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leading:</i> Dishut Provinsi ▪ <i>Supporting:</i> Dishut Kab. 				
3. <i>Participatory Rural Appraisal</i> (PRA) topik, Kehutanan untuk mendukung Pengembangan KUAT yang menghasilkan Rencana Kerja Masyarakat Jangka Menengah dan Jangka Pendek Tujuannya: Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan dan pemecahan permasalahan serta melaksanakan program-program sektor kehutanan yang	7 Paket	Sanggau Ledo, Singkawang, Merowi, Semabi, Senakin, Galing, Bunut Hulu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leading:</i> Dishut Provinsi ▪ <i>Supporting:</i> Dishut Kab. BPTP, Distan dan Disbun, BPDAS, 				

Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi KUAT	Pelaksana dan instansi pendukung	Tahun Kegiatan			
				07	08	09	10
mendukung program KUAT							
B. Program Perlindungan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu							
1. Pengembangan Wisata Alam Tujuannya : Memberikan arahan umum bagi pengembangan wisata alam	2 Paket	Sanggau Ledo, Singkawang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leading:</i> Dishut Provinsi ▪ <i>Supporting:</i> Dishut Kab, Dinas Pariwisata Kab. 				
2. Rehabilitasi/reboisasi hutan melalui pengkayaan tanaman hutan dan tanaman hasil hutan non kayu spesifikasi lokasi Tujuannya : Memberikan arahan umum dan acuan teknis rehabilitasi/reboisasi hutan melalui pengkayaan tanaman hutan dan tanaman hasil hutan non kayu spesifikasi lokasi	2 Paket	Sanggau Ledo, Singkawang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leading:</i> Dishut Provinsi ▪ <i>Supporting:</i> Dishut Kab. BPTP, Distan dan Disbun, BPDAS 				
C. Program Konservasi dan Rehabilitasi tanah/ hutan							
1. Pengembangan Agroforestry berbasis karet dan tanaman hutan Tujuannya : Memberikan arahan umum dan acuan teknis pengembangan agroforestry berbasis karet dan tanaman hutan	5 Paket	Singkawang, Merowi, Semabi, Galing, Bunut Hulu	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Leading:</i> Dishut Provinsi • <i>Supporting:</i> Dishut Kab. BPTP, Distan dan Disbun, BPDAS 				
D. Program Pemberdayaan Masyarakat							
1. Pelatihan Pengembangan Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan (Community Development & Community Organization) Tujuannya: Membangun partisipasi, kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola program dan kegiatan KUAT secara berkelanjutan	7 Paket	Sanggau Ledo, Singkawang, Merowi, Semabi, Senakin, Galing, Bunut Hulu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leading:</i> Dishut Provinsi ▪ <i>Supporting:</i> Dishut Kab. BPTP 				
2. Pelatihan Pengembangan Usaha Produktif berbasis Hutan Tujuannya: Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta latih dalam bidang usaha produktif dan pemasaran	7 paket	Sanggau Ledo, Singkawang, Merowi, Semabi, Senakin,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leading:</i> Dishut Provinsi ▪ <i>Supporting:</i> Dishut Kab, Deperindagk 				

Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi KUAT	Pelaksana dan instansi pendukung	Tahun Kegiatan			
				07	08	09	10
yang memberikan nilai tambah peningkatan pendapatan.		Galing, Bunut Hulu	op Kab.				
3. Pelatihan Penguatan Permodalan Kelompok dan Ekonomi Rumah Tangga Tujuannya: Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta latih dalam memobilisasi sumber permodalan swadaya dan luar melalui pengaturan ekonomi rumah tangga.	7 Paket	Sanggau Ledo, Singkawang, Merowi, Semabi, Senakin, Galing, Bunut Hulu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leading:</i> Deperindag op Kab ▪ <i>Supporting:</i> Dishut Kab. 			■	
4. Pelatihan Kelompok Usaha Bersama dan Perkoperasian Tujuannya: Mendorong masyarakat untuk membangun kelembagaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan kawasan dan sumber daya hutan	7 Paket	Sanggau Ledo, Singkawang, Merowi, Semabi, Senakin, Galing, Bunut Hulu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leading:</i> Deperindag op Kab ▪ <i>Supporting:</i> Dishut Kab. 			■	
5. Pelatihan Tanggap Darurat (Emergency Response) Kebakaran Hutan Tujuannya: Masyarakat tanggap dan mampu mengantisipasi kebakaran hutan secara dini.	7 paket	Sanggau Ledo, Singkawang, Merowi, Semabi, Senakin, Galing, Bunut Hulu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leading:</i> Dishut Provinsi ▪ <i>Supporting:</i> Dishut Kabupaten 		■		
7. Memberikan bantuan jenis tanaman serba guna atau MPTS dan Agroforestry kepada masyarakat	7 Paket	Sanggau Ledo, Singkawang, Merowi, Semabi, Senakin, Galing, Bunut Hulu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leading:</i> Dishut Provinsi ▪ <i>Supporting:</i> Dishut Kabupaten 		■		
8. Membangun unit-unit percontohan atau model di tingkat masyarakat untuk perlindungan hutan, pemanfaatan hasil hutan non kayu, konservasi dan rehabilitasi hutan.	7 Paket	Sanggau Ledo, Singkawang, Merowi, Semabi, Senakin, Galing, Bunut Hulu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leading:</i> Dishut Provinsi ▪ <i>Supporting:</i> Dishut Kabupaten 		■		
E. Koordinasi Lintas Sektor dan Program							
1. Rapat koordinasi lintas sektor dan program	7 Paket	Sanggau Ledo, Singkawang, Merowi, Semabi, Senakin, Galing, Bunut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leading:</i> Bappeda Kab/Kota ▪ <i>Supporting:</i> semua dinas/ instansi 		■		

Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi KUAT	Pelaksana dan instansi pendukung	Tahun Kegiatan			
				07	08	09	10
		Hulu					
2. Monitoring dan supervisi	7 Paket	Sanggau Ledo, Singkawang, Merowi, Semabi, Senakin, Galing, Bunut Hulu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leading:</i> Bappeda Kab/Kota ▪ <i>Supporting:</i> semua dinas/ instansi 				
3. Evaluasi Hasil dan Dampak	7 Paket	Sanggau Ledo, Singkawang, Merowi, Semabi, Senakin, Galing, Bunut Hulu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leading:</i> Bappeda Kab/Kota ▪ <i>Supporting:</i> semua dinas/ instansi 				

Model pemberdayaan masyarakat secara umum di atas masih memerlukan tahapan kegiatan, yakni studi karakterisasi dan identifikasi pengembangan wanatani pada hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan. Menurut Subarudi & Ludi (2004) dan Budiningsih (2004), hambatan utama dalam pengembangan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan di Indonesia adalah nilai produksi kayu belum mencukupi sebagai penghasilan utama petani dalam membiayai kebutuhan hidupnya. Sementara itu, model pengembangan wanafarma dapat dijadikan program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintah daerah.

Rencana Tindak sektor kehutanan pada pengembangan program KUAT masih memerlukan kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Sinergi program dan kebijakan antara instansi provinsi dan kabupaten harus dikedepankan untuk meningkatkan peluang keberhasilan program sektor kehutanan pada KUAT. Sinergi kebijakan sektor kehutanan dengan sektor lain dalam melaksanakan program

KUAT secara terpadu dapat dijelaskan pada Gambar 2.

Pengembangan KUAT diarahkan untuk melakukan transformasi menuju sistem usaha agribisnis terpadu, dengan target yang telah ditentukan berdasarkan kondisi awal (*benchmark*) suatu wilayah sasaran yang sesuai dengan kondisi sumber daya yang dimiliki. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan di suatu wilayah, maka perlu pra-kondisi yang harus diciptakan agar target tersebut dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kondisi awal kawasan (*benchmarking*) dan visi ke depan menjadi penting untuk dijadikan acuan analisis dalam merekayasa model pertanian yang sesuai untuk suatu kawasan. Sinergisme antar-institusi terkait perlu diciptakan dan diberdayakan sehingga terwujud kesatuan program yang saling mengisi.

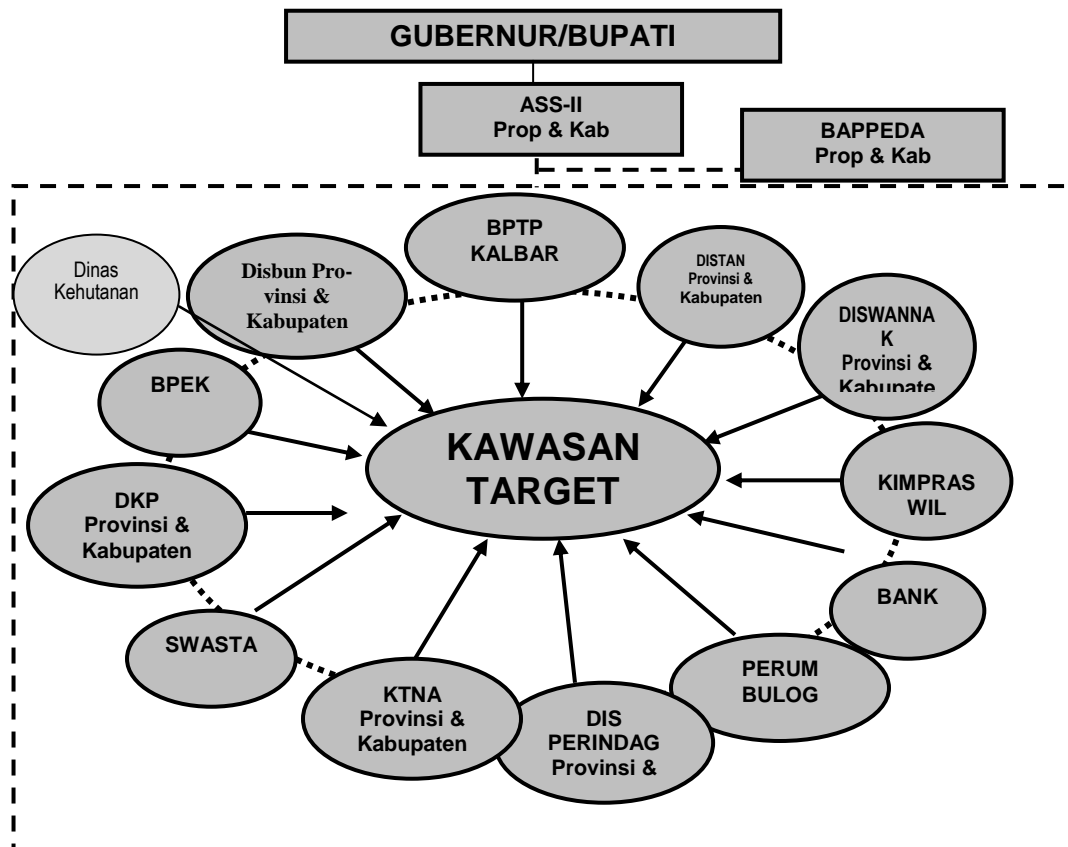
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan. Potensi sumber daya hutan merata di semua lokasi KUAT dengan

kondisi dan fungsi yang berbeda. Sebagian lokasi KUAT memiliki kawasan hutan lindung dan cagar alam yang berpotensi sebagai wisata hutan (*eco-tourism*). Secara umum dari sisi administratif terhadap penetapan wilayah lokasi KUAT, Pemerintah Kabupaten atau Kota menunjukkan komitmen dengan respon positif. Seperti ditunjukkan dengan menindaklanjuti SK Gubernur No.436/2004, tentang Tim Pengembangan Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu. Perencanaan pengembangan komoditas unggulan pada masing-masing kawasan KUAT sudah baik, dilihat dari ketersediaan air baku yang memadai, terutama untuk usaha tanaman pangan dan usaha perikanan. Berdasarkan

analisis kekeringan, sebagian besar kawasan KUAT aman dari bahaya kekeringan. Semetara itu, kawasan KUAT Solam Raya memiliki curah hujan yang rendah.

Saran. Rencana Tindak Sektor Kehutanan pada lokasi KUAT memerlukan prakondisi yang dipersiapkan sebaik-baiknya. Prakondisi tersebut antara lain: penyusunan rencana teknis, penyusunan rencana teknis rehabilitasi, dan konservasi lahan atau hutan serta PRA kehutanan



Gambar 2. Skema Kolaborasi Terpadu Dalam Penerapan Pengembangan KUAT

untuk mendukung pengembangan KUAT. Perlu adanya sosialisasi program sektor kehutanan pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan KUAT, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Tidak semua wilayah KUAT pada masing-masing kabupaten atau kota memiliki kawasan hutan, sehingga diperlukan pengelompokan wilayah KUAT yang mempunyai dan tidak mempunyai kawasan hutan. Model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di lokasi KUAT hendaknya mengikutsertakan semua lapisan masyarakat antara lain tokoh adat dan aparat pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim 2006. *Kalimantan Barat Dalam Angka 2006*. BPS Kalimantan Barat.

Budiningsih, K. 2004. Karakteristik Hutan Rakyat di Kalimantan Selatan. *Prosiding Ekspose Terpadu Hasil Penelitian: Menuju Pengembangan Hutan Tanaman Produktivitas Tinggi dan Ramah Lingkungan*. Yogyakarta, 11-12 Oktober 2004:199-205.

Darusman, D & Hadjanto. 2006. Tinjauan Ekonomi Hutan Rakyat. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Hasil Hutan*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Bogor. 4-13.

Ibrahim, T, Febrianty & L.M.Gufroni, 2006. *Analisis peluang kekeringan dan antisipasinya di wilayah KUAT sebagai dasar perencanaan pertanian di Kalimantan Barat*. Laporan Akhir Hasil Pengkajian. BPTP Kalimantan Barat.

Purwana, B.H & Sukasmanto. 2008. *Eksploitasi Lingkungan dan Perlawanan*

Masyarakat Adat di Kalimantan Barat (http://www.ireyogya.org/adat/flamma_adat_vol3_sorot.htm: 10 Juli 2003).

Subarudi & Ludi. 2004. Studi Karakterisasi dan Identifikasi Pengembangan Wanafarma Pada Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Banyumas. *Info Sosial Ekonomi*. 4 (1): 9-21.

Supranto, J. 1997. *Ekonometrika*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Suratno & Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Mikro*. BPFE Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.